



IKHTISAR EKSEKUTIF

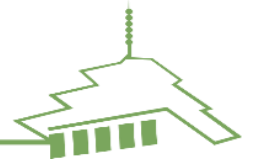
Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, Rencana Kinerja Tahun 2018, Perjanjian Kinerja Tahun 2018 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas penyelenggaraan program kegiatan pada Tahun 2018 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan menyajikan hasil Pengukuran Kinerja yang merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Tahun 2018. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya.

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya untuk



mengatur pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan tupoksi yang diembannya, maka pada tahun 2018 ini Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki 3 (tiga) sasaran strategis serta 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target dengan peringkat nilai AA.

Sementara apabila dibandingkan dengan target perencanaan jangka menengah, maka terlihat bahwa pada tahun 2018 ini hampir keseluruhan target yang telah ditetapkan telah tercapai, bahkan ada beberapa yang melebihi target.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 khususnya untuk Tahun Anggaran 2018 terpenuhi sesuai dengan harapan.

Memperhatikan perbandingan capaian kinerja antara target indikator kinerja dan realisasi Kinerja Sekretariat Daerah nampak seluruh indikator yang direncanakan berhasil dicapai dengan optimal sesuai target. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan pembinaan dan komitmen kuat dari seluruh pihak mulai dari Sekretaris Daerah, para Asisten Daerah dan para Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan seluruh pelaksana dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan prinsip efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Kata Pengantar | i |
| Ikhtisar Eksekutif | ii |
| Daftar Isi | iv |
| Daftar Tabel | vi |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Maksud dan Tujuan | 1 |
| 1.3. Gambaran Umum Organisasi Sekretariat Daerah | 2 |
| 1.4. Data Kepegawaian | 7 |
| | |
| BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 10 |
| 2.1. Visi dan Misi Sekretariat Daerah | 10 |
| 2.2. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah | 13 |
| 2.3. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah | 14 |
| 2.4. Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah | 15 |
| | |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA | 24 |
| 3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja | 24 |
| 3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja | 26 |
| 3.2.1. Sasaran Terwujudnya Perumusan Kebijakan Umum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat | 26 |
| 3.2.2. Sasaran Terwujudnya Perumusan Kebijakan Umum lingkup Sekretariat Daerah | 32 |
| 3.2.3. Sasaran Terwujudnya Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat yang efektif dan efisien | 32 |
| A. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat | 33 |
| B. Prosentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai CC ke atas | 34 |
| C. Peringkat LPPD Provinsi | 35 |
| D. Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) | 38 |
| E. Indikator Prosentase Realisasi Belanja APBD | 42 |
| F. Persentase pelayanan terhadap permintaan informasi yang dipenuhi | 42 |



| | |
|--|-----------|
| G. Jumlah Berita Acara RUPS dan RUPS-LB | 43 |
| 3.3. Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Strategis Setda Efisiensi Sumber Daya | 46 |
| 3.3.1. Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Strategis Terwujudnya Perumusan Kebijakan Umum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat | 46 |
| 3.3.2. Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Strategis Terwujudnya Perumusan Kebijakan Umum Lingkup Setda | 48 |
| 3.3.3. Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Strategis Terwujudnya Perumusan Kebijakan Umum Lingkup Setda | 49 |
| BAB IV. PENUTUP | 51 |



DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|--|----|
| Tabel 1.1. | Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin Periode Desember 2018 | 7 |
| Tabel 1.2. | Data PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah Berdasarkan Unit Kerja Periode Desember 2018 | 8 |
| Tabel 1.3. | Profil Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan Ruang Gaji Periode Desember 2018 | 8 |
| Tabel 1.4. | Profil Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan Periode Desember 2018 | 9 |
| Tabel 1.5. | Profil Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan Periode Desember 2018 | 9 |
| Tabel 2.1. | Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah | 13 |
| Tabel 2.2. | Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah | 14 |
| Tabel 2.3 | Program Dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2018 | 16 |
| Tabel 3.1. | Skala Nilai Peringkat Kinerja | 25 |
| Tabel 3.2. | Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 | 25 |
| Tabel 3.3. | Capaian Kinerja Indikator Perumusan Kebijakan Umum Pemerintah Daerah yang di Tindaklanjuti | 27 |
| Tabel 3.4. | Perbandingan Target dan Realisasi 2013-2023 Pembentukan Peraturan Daerah dan Penyusunan Peraturan Gubernur | 28 |
| Tabel 3.5. | Kerja Sama Dalam Negeri, Antar Daerah, Daerah dengan pihak Ketiga | 31 |
| Tabel 3.6. | Capaian Indikator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat | 33 |
| Tabel 3.7. | Capaian Prosentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai CC | 34 |
| Tabel 3.8. | Realisasi Kinerja dan Anggaran yang mendukung WTP | 40 |
| Tabel 3.9. | Capaian Kinerja Sasaran Strategis Indikator Persentase pelayanan terhadap permintaan informasi yang dipenuhi | 43 |
| Tabel 3.10. | Capaian Kinerja Indikator Jumlah Berita Acara RUPS dan RUPS-LB | 45 |



| | | |
|-------------|--|----|
| Tabel 3.11. | Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Strategis Terwujudnya Perumusan Kebijakan Umum Pemerintah Daerah Prov Jawa Barat | 46 |
| Tabel 3.12. | Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Program Pendukung Sasaran Strategis Terwujudnya Perumusan Kebijakan Umum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat | 48 |
| Tabel 3.13. | Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Strategis Terwujudnya Perumusan Kebijakan Umum Lingkup Setda | 48 |
| Tabel 3.14. | Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Program Pendukung Sasaran Strategis Terwujudnya Perumusan Kebijakan Umum Lingkup Setda | 49 |
| Tabel 3.15. | Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat yang Efektif dan Efisien | 49 |